

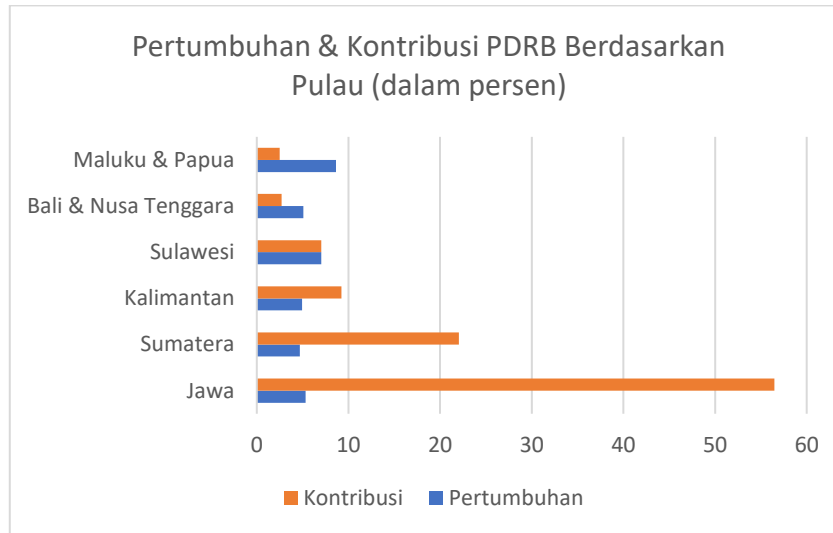
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kesejahteraan ini tercermin dalam kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen utama dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Keberhasilan ekonomi dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara.

Boediono (1981) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses jangka panjang dari kenaikan output perkapita pada suatu negara. Untuk melihat apakah perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan dapat dilihat melalui meningkatnya pendapatan riil masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Boediono juga berpendapat pertumbuhan yang tinggi dan stabil dari tahun ketahun menandakan bahwa terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi pada suatu negara, dan juga sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi menurun menandakan bahwa terjadi penurunan tingkat kesejahteraan ekonomi pada suatu negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi dari suatu masyarakat dapat dilihat melalui meningkat atau menurunnya laju pertumbuhan ekonomi.



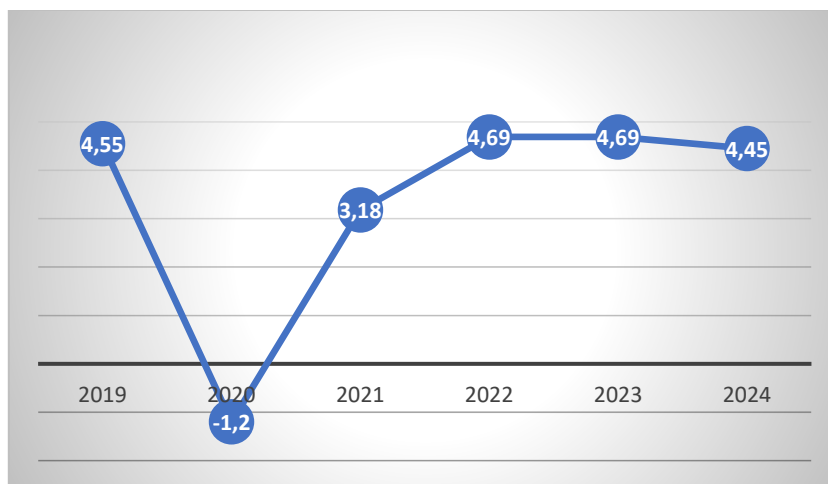
Gambar 1.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Berdasarkan Pulau Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistika

Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2022, Pulau Sumatera menjadi penyumbang terbesar kedua dalam PDRB nasional setelah Pulau Jawa. Pada gambar 1.1 Pulau Sumatera memberikan kontribusi sebesar 22,04% terhadap total PDRB nasional. Sementara itu, Pulau Jawa menempati posisi pertama dengan kontribusi terbesar, yaitu 56,48%. Selain Pulau Jawa dan Sumatera, wilayah lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua, masing-masing memiliki kontribusi yang lebih kecil, yaitu di bawah 10% terhadap total PDRB nasional. Meskipun kontribusinya relatif rendah, wilayah Maluku dan Papua mencatatkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan presentase sebesar 8,65%. Sulawesi di posisi kedua dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,05%. Selanjutnya Jawa dengan 5,31%, Bali dan Nusa Tenggara 5,08%, Kalimantan sebesar 4,94% dan Sumatera dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69%. Perbedaan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi antarwilayah ini mencerminkan disparitas ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta kebijakan pembangunan yang

diterapkan masing-masing daerah. Wilayah dengan tingkat pembangunan yang lebih maju cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan daerah yang masih dalam tahap perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan tetap menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase perubahan pendapatan nasional. Adapun pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Gambar 1.2.



**Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2024
(persen)**

Sumber: Badan Pusat Statistika (Diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera memiliki perkembangan yang berfluktuatif. Adapun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar -1,20 persen yang dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang memperlambat pertumbuhan karena adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Pada tahun 2021, perekonomian mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,18 persen. Pertumbuhan ini terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023, di mana angka

pertumbuhan meningkat dan stabil di angka 4,69 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 4,45 persen. Perkembangan ini mencerminkan sensitivitas ekonomi terhadap beberapa faktor seperti pandemi global, struktur demografi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor determinan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Salah satu pendekatan yang relevan adalah melalui pemanfaatan potensi bonus demografi yang diyakini dapat menjadi peluang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Jumlah penduduk memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Semakin banyak penduduk yang memiliki keterampilan dan produktif, semakin besar kontribusi penduduk dalam pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai, hal ini dapat menjadi beban yang menghambat pembangunan dan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga pendidikan. Oleh karena itu, perlu diantisipasi karena jika negara tidak mampu melakukan antisipasi terhadap peningkatan penduduk yang begitu cepat, maka hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Gunawan et al., 2020).

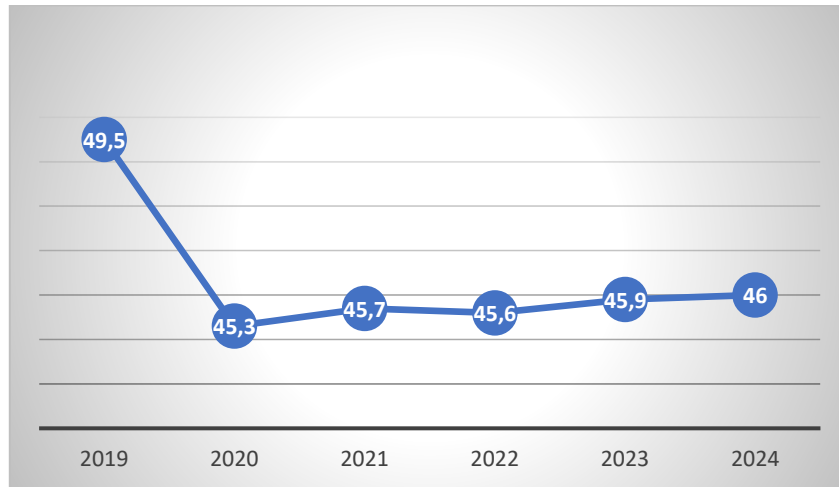
Di Indonesia terdapat kekhawatiran bahwa tingginya jumlah penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat memperlambat perkembangan ekonomi, terutama ketika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari 119 juta jiwa pada tahun 1971 menjadi 237 juta jiwa pada tahun 2010. Dengan jumlah populasi yang besar, Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Indonesia saat ini tengah mengalami transisi demografi, yang ditandai dengan perubahan struktur usia penduduk akibat keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Program ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan penduduk. Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa

kelompok usia di bawah 15 tahun mengalami peningkatan yang lebih lambat dibandingkan kelompok usia produktif. Sensus penduduk tahun 2010 mengonfirmasi bahwa jumlah penduduk berusia di bawah 15 tahun hanya sedikit mengalami kenaikan dari 60 juta menjadi 63 sampai 65 juta dalam tiga dekade terakhir. Sebaliknya, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat pesat dari sekitar 63 juta jiwa pada tahun 1970 menjadi lebih dari 133 juta jiwa dalam kurun waktu 30 tahun terakhir (Jati, 2015).

Bonus demografi dianggap sebagai jendela kesempatan (*window of opportunity*) yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena banyaknya penduduk usia produktif (Maryati sri, 2015). Jumlah penduduk produktif yang tinggi dapat memicu tabungan yang lebih besar pada akhirnya meningkatkan investasi di wilayah tersebut. Namun, besarnya penduduk usia produktif ini juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas yang tinggi (Setiawan, 2019).

Bonus demografi dapat ditinjau melalui angka rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia non-produktif dan produktif. Wilayah yang rasio ketergantungannya berada dibawah 50 persen dikatakan memasuki kondisi bonus demografi (Kominfo, 2014). Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS), bonus demografi nasional terjadi sejak 2012 dan diprediksi berlangsung hingga 2045. Namun, situasi ini berbeda-beda di setiap daerah. Berikut data terkait rata-rata rasio ketergantungan di Pulau Sumatera tahun 2019 hingga 2024.



Gambar 1. 3 Rasio Ketergantungan di Pulau Sumatera Tahun 2019-2024 (dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistika (Diolah)

Berdasarkan gambar 1.3 bahwa, rasio ketergantungan di Pulau Sumatera pada tahun 2019 tercatat sebesar 49,5 persen, yang mencerminkan masih tingginya beban tanggungan penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan menjadi 45,3 persen, yang kemudian diikuti oleh tren yang relatif stabil 45,7 persen pada 2021 dan 45,6 persen pada 2022, dan sedikit meningkat menjadi 46 persen pada 2024. Penurunan rasio ketergantungan ini mencerminkan adanya pergeseran struktur demografi menuju dominasi penduduk usia produktif, yang dikenal sebagai bonus demografi. Kondisi ini memberikan peluang strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah apabila didukung oleh kebijakan yang mampu memberdayakan angkatan kerja secara optimal.

Dalam prespektif ekonomi kependudukan, bonus demografi dipandang sebagai kesempatan bagi suatu negara untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Bonus demografi memungkinkan peningkatan tabungan nasional akibat menurunnya beban ketergantungan, sehingga dana yang sebelumnya dialokasikan untuk konsumsi dapat dialihkan ke sektor investasi dan pengembangan ekonomi. Negara-negara yang

berhasil memanfaatkan bonus demografi seperti, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Tiongkok meningkat dari 6% menjadi 9,2%, Korea Selatan dari 7,3% menjadi 13,2% dan Thailand dari 6,6% menjadi 15,5% setelah memasuki proses bonus demografi (Maryati, 2015).

Meskipun bonus demografi menawarkan berbagai peluang, keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu tingkat kemiskinan merupakan hal yang perlu menjadi perhatian, sebab kemiskinan menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan perekonomian, hal ini dikarenakan semakin tinggi jumlah kemiskinan menggambarkan rendahnya penduduk produktif di wilayah tersebut (Arifin & Faridatussalam, 2023). Selain menunjukkan keterbatasan ekonomi, kemiskinan juga sering kali menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat yang miskin cenderung memiliki daya beli rendah dan akses terbatas pada layanan pendidikan serta kesehatan (Utami, 2020). Di Pulau Sumatera, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 96,1 persen pada tahun 2019, ditahun 2020 sedikit menurun menjadi 95,1 persen, sempat mengalami kenaikan menjadi 97,5 persen pada tahun 2021. Kemudian mencapai titik terendah sebesar 84,8 persen pada tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera dan kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi pasca pandemi. Penurunan ini diharapkan dapat terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Masalah Pengangguran juga dinilai sebagai faktor yang dapat menghambat dalam meningkatkan perekonomian, alasan yang mendasari adalah pengangguran yang tinggi mengindikasikan penyerapan tenaga kerja yang sedikit sehingga produktivitas masyarakat menurun hal ini dapat menyebabkan pendapatan masyarakat juga ikut menurun sebagai akibatnya kesejahteraan masyarakat menjadi rendah (Febrianti et al., 2021). Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka merupakan bagian dari penduduk yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja,

sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan presentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera pada tahun 2019 tercatat sebesar 49,8 persen dan melonjak pada tahun 2020 mencapai 61,9 persen yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid terhadap sektor ketenagakerjaan. Kemudian turun menjadi 47,2 persen di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi serta peningkatan kesempatan kerja di Pulau Sumatera, meskipun memiliki potensi tenaga kerja yang besar, masih ada tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi penduduknya. Pengangguran yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun. Hal ini dapat mempengaruhi minat investor untuk memperluas usaha di wilayah tersebut, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya bonus demografi di Pulau Sumatera maka akan dilihat bagaimana dampaknya terhadap perkembangan ekonomi. Terkait penjabaran latar belakang tersebut penulis terdorong guna menelusuri dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan judul “ **Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan rasio ketergantungan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh rasio ketergantungan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perkembangan rasio ketergantungan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera
2. Untuk menganalisis pengaruh rasio ketergantungan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan yang relevan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para *stakeholder* terkait, seperti pemerintah daerah di Pulau Sumatera dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif untuk memanfaatkan bonus demografi.